

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, dalam salah satu pasalnya, mengatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Karenanya prinsip akuntabilitas mengharuskan dalam setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi** di bawah ini :

#### **1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **1.1.1. Tugas Pokok :**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

##### **1.1.2. Fungsi :**

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan secara integratif dapat diarahkan kepada pencapaian sasaran yang memungkinkan terlaksananya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut:

**Tabel 1.1**

### REGISTER PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Kadaan : 31 Desember 2021**

N O	NAMA	L / P	Gol	Esel on	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Murdi, AP, M.Si</b>	L	IV/b	Ila	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-2 Ilmu Politik	SPAMEN	
2	<b>Masujadi, SH</b>	L	IV/a	IIla	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-1 Ilmu Hukum	Diklatpim IV	
3	<b>H. Amirudin Nur, SE</b>	L	IV/a	IIla	Kepala Bidang Pembinaan Politik	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Diklatpim IV	
4	<b>Herwin Ahwanudin, SH</b>	L	IV/a	IIla	Kepala Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa	S-1 Ilmu Hukum	Diklatpim IV	
5	<b>Fero Ramdhoni, S.IP</b>	L	III/a	IIla	Kepala Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa	S-1 Ilmu Pemerintahan	Diklatpim IV	
6	<b>Suhartono, S.IP</b>	L	III/c	IVa	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S-1 Ilmu Pemerintahan	Diklatpim IV	

7	Suwardi, S.Sos	L	III/d	IVa	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
8	Lalu Abdul Khalik, S.Sos	L	III/d	IVa	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim IV	
9	M. Sabri, S.Sos	L	III/d	IVa	Kepala Sub Bidang Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim IV	
10	Junaidi, S.Sos	L	III/d	IVa	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim IV	
11	Sri Hidayati, SE	P	III/d	IVa	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Diklatpim IV	
12	Samsurriyadi, S.Sos	L	III/c	IVa	Kepala Sub Bidang Politik, Ideologi dan Demokrasi	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
13	Baiq Damar Asri, SE	P	III/b	IVa	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan		
14	Murdhi, S.Sos	L	III/a		Fungsional umum (staf) pada Subbid Politik, Ideologi dan Demokrasi	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
15	Hassugian Putra Kusuma, A.Md.T	L	III/b		Fungsional umum (staf) pada Subbid Ketahanan Ekonomi	D-III Teknik		
16	Lalu Wiragune, S.Adm	L	III/b		Fungsional umum (staf) pada Subbid Sosial Budaya	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
17	Lalu Alfian, SH	L	III/a		Fungsional umum (staf) pada Subbid Wawasan Kebangsaan	S-1 Ilmu Hukum		
18	Monica Christine Batubara, SE	P	III/a		Fungsional umum (staf) pada Subbag	S-1 Akuntansi		

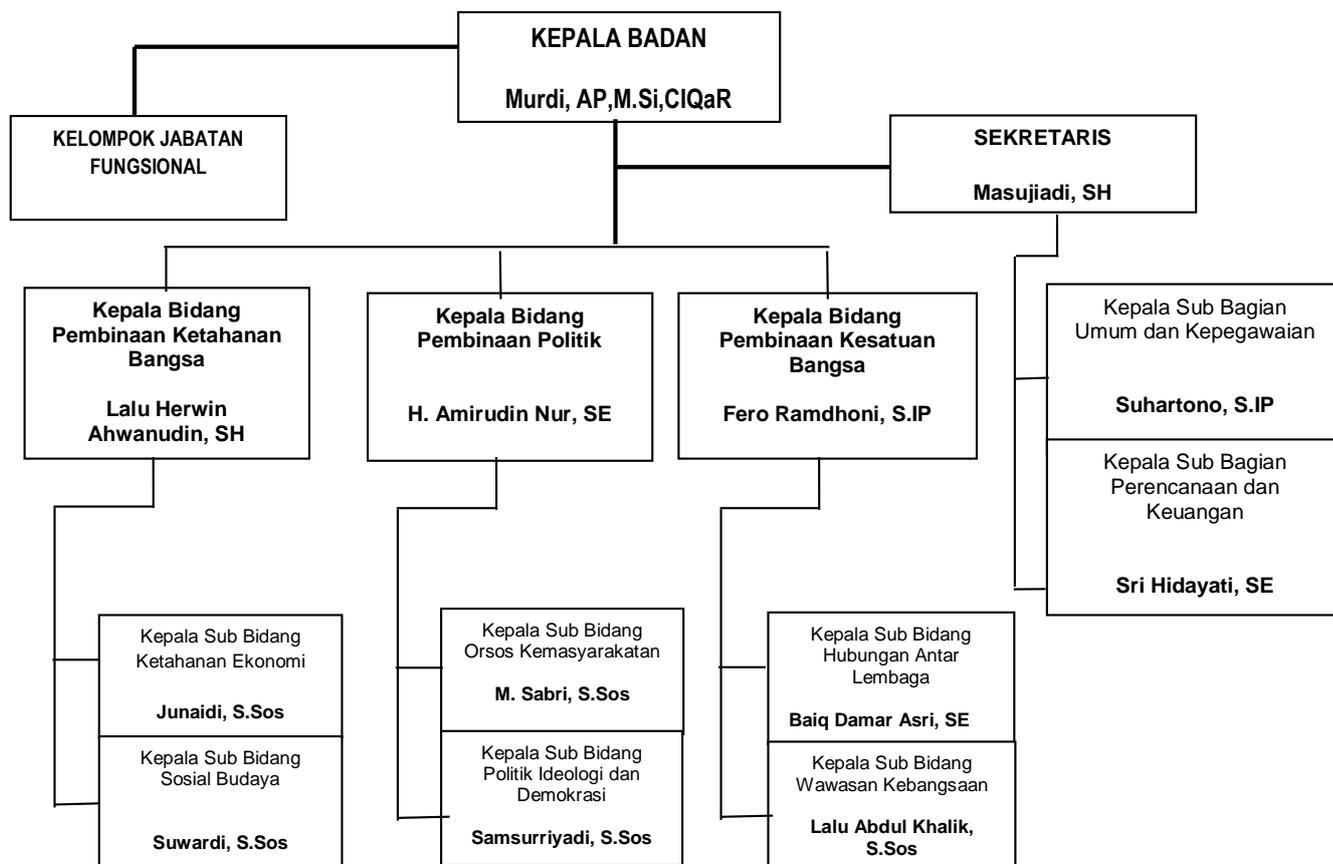
					Perencanaan dan Keuangan			
19	Juwaini	L	II/d		Fungsional umum (staf) pada Subbid Ketahanan Ekonomi	SLTA – Madrasah Aliyah		
20	Hani Fitriati	P	II/d		Fungsional umum (staf) pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	SLTA - IPS		
21	Haerul Muchson	L	II/c		Fungsional umum (staf) pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA - Bahasa		
22	H. Nasri	L	II/a		Fungsional umum (staf) pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SD – Paket C		

Berdasarkan tabel kualifikasi pegawai diatas, SDM/Aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dianggap sudah memiliki kualitas yang handal dan mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat.

### I.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR BADAN KESBANGPOL**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1 Rencana Strategis SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu arah kebijakan yang di susun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada **Misi ke-1** yaitu : "Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat". Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama. Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah ditugaskan untuk membantu tercapainya tujuan kepala daerah yang berfokus pada pencapaian sasaran Misi 1 baik pada sasaran 1 dan sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat" dan "Meningkatnya moderasi beragama". Dimana hal tersebut akan dituangkan pada "Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial" serta "Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya". Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan peran lembaga mediasi desa dalam penyelesaian konflik sosial, dengan cara Bale Mediasi Kabupaten yang akan menjadi media penyelesaian konflik perdata maupun pidana ringan di tengah masyarakat baik dari tingkat desa sampai kabupaten. Dimana Bale Mediasi akan beranggotakan Tokoh-tokoh Agama dan tenaga-tenaga ahli sebagai mediator di tengah masyarakat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Sekertariat Bale Mediasi Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam mencapai sasaran ke 2 Bakesbangpol berperan dalam pembinaan dan koordinasi dengan Forum kerukunan Beragama atau FKUB.

#### **TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu **“TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT”** dan **“TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.”**

## **SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan sasaran **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya”** dan **“Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

## RENCANA STRATEGIS

**TAHUN 2021 S.D. 2026**

Instansi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya Nilai-Nilai Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan sosial budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama</li> <li>Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat kerukunan antar umat beragama</li> </ol>	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	
2. Terwujudnya Nilai-Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/Ormas dan Parpol</li> <li>Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya politik</li> <li>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> </ol>	
		Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	1. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

			1. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama/tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
--	--	--	---	---	--

## II.2 Rencana Kinerja Tahunan

### RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD:(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Tahun:(2021)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan sosial budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA	100 %
2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %
	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %
3. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	B

## II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
								1	2	3	4	5	6	
1	TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		Indeks sikap	$\frac{\sum \text{Frekuensi\_pernyataan sikap} \times \text{Skor}}{\sum \text{Frekuensi\_pernyataan sikap}}$	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa	Bakesbangpol	3,24	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00	4,00
			Indeks kerjasama dan hubungan sosial	$\frac{\sum \text{Frekuensi\_pernyataan kerjasama} \times \text{Skor}}{\sum \text{Frekuensi\_pernyataan kerjasama}}$			3,24	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00	4,00
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah Konflik berlatar belakang SARA		Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa	Bakesbangpol	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		Persentase Penurunan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun } n-1 \text{ dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun } n \text{ dan } n-1 \text{ dibagi jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun } n-1 \text{ dikali } 100 \text{ dibagi dua}}$	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bakesbangpol	0	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah konflik berlatar belakang politik dibagi jumlah konflik dikali } 100}$	Bidang Pembinaan Politik dan Ormas	Bakesbangpol	0	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah konflik berlatar belakang sosial ekonomi dibagi jumlah konflik dikali } 100}$	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa	Bakesbangpol	0	100	100	100	100	100	100	100

## II.4 Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2021



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Murdi, AP, M.Si, CIQaR**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama akan berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak ke dua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**

Praya, Oktober 2021  
Pihak Pertama,

**Murdi, AP, M.Si, CIQaR**  
NIP. 197512311994121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Nilai – Nilai Spritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Sikap	3,40
			Indeks Kerjasama dan Hubungan Sosial	3,40
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA	100 %
2	Terwujudnya Nilai – Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat		<b>Persentase Penurunan Konflik Sosial</b>	<b>100 %</b>
		Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %
			Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 244.216.076	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 62.315.399	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Rp. 18.591.323	APBD

serta Budaya Politik

- |  |                 |      |
|--|-----------------|------|
| 4. Program Pemberdayaan<br>Dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan  | Rp. 962.442.013 | APBD |
| 5. Program Pembinaan<br>Dan Pengembangan<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Dan Budaya   | Rp. 37.237.184  | APBD |
| 6. Program Peningkatan<br>Kewaspadaan Nasional<br>dan Peningkatan<br>Kualitas dan Fasilitasi<br>Penanganan Konflik<br>Sosial | Rp. 850.509.566 | APBD |

Praya , Oktober 2021

Bupati Lombok Tengah

( H. Lalu Pathul Bahri, S.IP )

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Murdi, AP, M.Si, CIQaR )

## RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : Bakesbangpol

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Murdi, AP,M.Si	NAMA	H. Lalu Pathul Bahri, S.IP
NIP	197512311994121002	NIP	
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/GOL RUANG	Bupati Lombok Tengah
JABATAN	Kepala Badan	JABATAN	
INSTANSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	INSTANSI	
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA	100 %
	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	1. Persentase Konflik Berlatar Belakang Politik Terselesaikan 2. Persentase Konflik Berlatar Belakang Sosial Ekonomi Terselesaikan	100 %  100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	B
	Terlaksananya Direktif Pimpinan		12 Bulan
<b>B. KINERJA TAMBAHAN</b>			

Praya , 2 Januari 2022

Pejabat yang dinilai,



( Murdi, AP,M.Si )

Pejabat Penilai Kinerja,



( H. Lalu Pathul Bahri, S.IP )

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Bakesbangpol pada Tahun 2021 sesuai dengan tabel di atas sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka keberhasilan pencapaian kinerja pada realisasi kinerja berada dalam kisaran 86 s/d 100 sehingga dapat dikategorikan “ **BAIK** ”.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGAT KURANG

### III.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Sasaran No. 1** “Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya”

Sasaran No. 1 tersebut diukur dengan Nilai 86 s/d 100 dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Jumlah Konflik berlatar belakang SARA

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya			Target awal renstra 2022	Sumber Data
						2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA	%	100	100	100%	0	0	0	0	Dokumen, Laporan
RATA-RATA					100%	KRITERIA Tahun 2021: BAIK				

Indikator sasaran 1 yaitu “Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA” Didukung dengan 1 (satu) program yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 2 (dua) indikator program.

Indikator program ke 1 yaitu “Persentase Desa yang Menganangkan Desa Bebas Narkoba”, sedangkan indikator program ke 2 yaitu “Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama” dimana Program dan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa pada tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

**Sasaran No. 2 “Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat”**

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan Nilai 86 s/d 100 dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan
2. Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya			Target awal renstra 2022	Sumber Data
						2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	%	100	100	100%	0	0	0	100	Dokumen, Laporan
2	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	%	100	100	100%	0	0	0	100	Dokumen, Laporan
RATA-RATA					100%	KRITERIA Tahun 2021: BAIK				

Indikator sasaran 2 yaitu “Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan” dan “Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan” Didukung dengan 4 (empat) program yaitu:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 (satu) indikator program yaitu “Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik”, dimana Program dan kegiatan–kegiatan Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa antara lain :

1. Fasilitasi Kegiatan FKUB dan MUI dengan indikator 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen atau 100%
  2. Sosialisasi 5 M dalam rangka pencegahan Covid – 19 dengan target 50 orang dan realisasi 50 orang atau 100%
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya politik dengan 3 (tiga) indikator program

Indikator program ke 1 yaitu “angka partisipasi pemilih dalam PEMILU”, indikator program ke 2 yaitu “Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi” sedangkan indikator program ke 3 yaitu “Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik” dimana Program dan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Politik dan Ormas pada tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 2 (dua) indikator program

Indikator program ke 1 yaitu “Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi”, sedangkan indikator program ke 2 yaitu “Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha” dimana Program dan kegiatan–kegiatan Bidang Pembinaan Politik dan Ormas pada tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Politik antara lain :

1. Sosialisasi kepada Pengurus Partai Politik dengan indikator 20 orang terealisasi 25 orang atau 100%
2. Pelaksanaan Kegiatan Dialog Publik, Pelatihan Manajemen Ormas dan Monev Ormas dengan target 3 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan atau 100%

3. Peserta Pelatihan Manajemen Pengelola Ormas, LSM dan Yayasan dengan target 50 orang dan realisasi 50 orang atau 100%
4. Pembuatan SKT dan SKM dengan target 50 dokumen dan realisasi 50 dokumen atau 100%
  - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan 1 (satu) indikator program yaitu “Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik”, dimana Program dan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa antara lain :

1. Pelatihan Ketahanan Bangsa (Narkoba dan Faham Teroris) dengan target indikator 100 orang dan realisasi 100 orang atau 100 %
2. Pemantauan Aliran Kepercayaan dengan target 12 dokumen dan tercapai 12 dokumen atau 100%
3. Peningkatan Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik dengan target 100% dan tercapai 100%
4. Pemantauan dan Penanganan Konflik dengan target 12 dokumen tercapai 100%
5. Pemantauan Orang Asing dengan target 12 dokumen tercapai 100%
6. Fasilitasi FORKOPIMDA, Timdu PKS, TKDPD dan Tim POA dengan target 4 kegiatan dan tercapai 100%

### III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2021

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021**

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2015)
1	Terwujudnya Nilai-Nilai Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	100%	Baik	100%	Baik	100%
2	Terwujudnya Nilai-Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat	2	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	100%	Baik	100%	Baik	100%
Rata-rata Total				100%	Baik/Sedang/ Kurang/ Sangat Kurang	100%	Baik/Sedang/ Kurang/ Sangat Kurang	

### III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12,693,867		12,693,867	12,693,867	100	Sekretariat
2.	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,951,476,521	1,951,476,521			1,951,476,521	1,880,337,039	96.35	Sekretariat
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2,814,000	26,107,788	4,440,000	33,356,788	33,356,788	100	Sekretariat
4	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10,272,370	7,480,000	17,752,370	17,752,370	100	Sekretariat
5	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,800,000		10,800,000	10,800,000	100	Sekretariat
6	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,762,000		12,762,000	9,280,000	72,72	Sekretariat

7	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				96,657,000	96,657,000	96,657,000	100	Sekretariat
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			16,728,445		16,728,445	16,728,445	100	Sekretariat
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66,217,000		66,217,000	52,805,995	79,75	Sekretariat

**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

1	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			62,315,339		62,315,339	52,865,339	84,84	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
---	---	--	--	------------	--	------------	------------	-------	-------------------------------

**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan			18,591,323		18,591,323	18,591,323	100	Sub Bidang Politik, Ideologi dan Demokrasi
---	--	--	--	------------	--	------------	------------	-----	--

	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>									
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			940,866,706		940,866,706	940,866,706	100	Sub Bidang Organisasi Sosial Masyarakat
2	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			21,575,307		21,575,307	21,575,265	100	Sub Bidang Organisasi Sosial Masyarakat
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>									
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			23,242,469		23,242,469	23,242,469	100	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
2	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi			13,994,715		13,994,715	13,994,715	100	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

	dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			731,440,593		731,440,593	729,971,593	99,80	Sub Bidang Sosial Budaya
2	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			64,010,255		64,010,255	64,010,255	100	Sub Bidang Sosial Budaya
3	Kegiatan Pelaksanaan			18,003,163		18,003,163	18,003,163	100	Sub Bidang Sosial Budaya

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB IV PENUTUP**

### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA.
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2021
3. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2021

#### 1. DATA PRESTASI/ PENGHARGAAN

Data prestasi, penghargaan, piagam, juara, yang diperoleh secara individual, kelompok, organisasi dan daerah yang didapatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2021 (tingkat provinsi, Nasional dan Internasional)

<b>NO</b>	<b>JENIS PRESTASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	-	-

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

<b>NO.</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021</b>	<b>SASARAN RENSTRA SKPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD</b>	<b>PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2021</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2021</b>	<b>ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021</b>
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	Ahlaqul Karimah dan Penanaman Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan sosial budaya	Indeks Sikap	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan social budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	37,237,184
2	Meningkatnya Moderasi Beragama		Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Indeks Kerjasama dan Hubungan Sosial	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	62,315,399
				Persentase Konflik Berlatar Belakang SARA		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	18,591,323
				Persentase Penurunan Konflik Sosial		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	962,442,013

				Persentase Konflik Berlatar Belakang Politik Terselesaikan		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	850,509,566
				Persentase Konflik Berlatar Belakang Sosial Ekonomi Terselesaikan		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	850,509,566

Praya, 31 Desember 2021  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah,



Murdi, AP, M.Si  
NIP. 197512311994121002